



## Mendampingi Wali Kota Jogja Herry Zudianto ke Padang Menyebarkan Virus Clean Government dan Ijtihad Politik

**10 tahun Otonomi Daerah di-peringati oleh harian Padang Ekspres (Grup Jawa Pos) dengan menggelar seminar Kreatif dan Mandiri Tanpa Korupsi. Wali Kota Jogja Herry Zudianto menjadi salah satu pembicaranya.**

**PENAMPILAN** Herry Zudianto dalam seminar yang digelar di Pangrangan Beach Hotel, Padang kemarin mendapat sambutan hangat. Dalam acara itu ada para "pendekar" korupsi lain seperti Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Padang Dr Saldi Isra maupun Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah. Tapi, tampilnya Herry seperti ditunggu-tunggu.

Terbukti, begitu Herry menyampaikan paparannya, banyak yang mengatakan bahwa Padang harus belajar banyak dari Jogja. Aplaus pun bergema setiap Herry memaparkan contoh-contoh kebijakan yang ia terapkan di Kota Jogja.

Pada kesempatan itu, Herry banyak mengungkap kebijakan yang terkait dengan pelayanan publik maupun upaya transparansi dalam setiap kebijakan. Herry memaparkan mulai program UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan), hingga e-procurement.

Dipaparkan pula program Wali Kota Menyapa melalui media massa. Mulai dari siaran radio yang harus dipantau oleh para kepala dinas hingga kegiatannya menyusuri kampung-kampung di pagi hari.

► *Baca Menyebarkan... Hal 13*

**■ MENYEBAR**  
*Sambungan dari hal 3*

"Semua dinas harus memantau dan menjawab langsung keluhan masyarakat yang disampaikan lewat radio. Kalau bisa ditindaklanjuti dengan langkah nyata harus segera dilakukan. Tapi, kalau tidak harus segera dicari jalan keluar secepatnya," tegas Herry saat menyampaikan paparannya.

Wali Kota juga memaparkan ijtihad politik yang dilakukannya dalam melayani masyarakat. Ia memakai prinsip jika tidak ada larangan mengapa tidak dilakukan. Maka, Herry pun mengungkapkan adanya santunan kematian bagi warga Kota Jogja. "Kan tidak ada larangan untuk memberi santunan semacam itu. Jadi, kalau kita adakan pun tidak akan ada masalah," rinci salah satu Tokoh Tempo 2008 ini.

Santunan kematian ini yang semula hanya sebesar Rp 500 ribu setiap warga, kini sudah meningkat menjadi Rp 600 ribu.

Begitulah, Herry Zudianto dalam seminar itu benar-benar menyebarkan virus-virus clean government dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Sedangkan pembicara lain, mengungkap kaitan otonomi daerah dengan pemekaran. Saldi Isra, misalnya, mengatakan pemekaran daerah harus dihindarkan untuk memperkuat basis ekonomi. Kecenderungan global justru merger atau menggabungkan daerah untuk membangun kawasan-kawasan dalam skala lebih luas.

Sebab, daerah yang makin mengecil akan lemah dan tergant...

tung dengan sumber keuangan pusat sehingga terjadi pemborosan dalam pembiayaan. Ini merupakan salah satu problem otonomi daerah. "Bagaimana bisa kuat kalau daerah itu diperkecil. Justru akan lebih boros untuk biaya operasional dan segala macam pembiayaan untuk menghidupi daerah pemekaran tersebut," terang Saldi.

Menurut Saldi Jepang sudah mulai melakukan merger sejak tahun 1980-an dan kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Karena itu daerah-daerah pemekaran yang tidak mampu menjalankan otonomi harus dikembalikan ke induknya.

Sejak awal, konsep pemekaran harus diikuti dengan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan evaluasi sekali dalam tiga tahun. Karena itu, pemekaran yang dilakukan harus melalui kajian yang sangat matang dan dalam waktu lama. Sebab berdasarkan riset yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hanya 15 persen daerah pemekaran yang layak dipertahankan yakni berkembang dengan baik, pelayanan baik dan pembiayaannya tidak tergantung pusat.

Saldi juga menegaskan mulai sekarang pemekaran harus dihentikan kalau pengusulannya hanya berdasarkan basis etnik dan agama. Menurutnya kalau semua etnik dan agama mau bangun daerah masing-masing maka basisnya akan makin mengecil. "Yang jadi masalah dari kita adalah usulan dari daerah menjadi konsumsi politisi di pusat yang tidak memperhitungkan dampak dari pemekaran itu," tegasnya.\*\*\*

INSTANSI	NILAI BERTILAK	KETERANGAN
Inspektorat Bag. Humas & Inf	<input type="checkbox"/> Negatif <input checked="" type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Sebab, daerah yang makin mengecil akan lemah dan tergant...

# Paparkan Santunan Kematian untuk Warga



SEBAR VIRUS: Hery Zudianto (kanan) dalam seminar 10 tahun reformasi yang digelar di Padang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 30 April 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005